

# Memahami *Framing* Gerakan Sosial

**A. SUMARWAN**

*Framing* gerakan sosial adalah strategi penyederhanaan persoalan dengan tujuan untuk memobilisasi pengagum dan pengikut, menuai dukungan dari penonton, dan membuyarkan penentang (Snow & Benford, 1988).

**A**hok awalnya hanyalah perkara Pilkada Jakarta. Namun sejak penistaan agama dituduhkan kepadanya dan Ahok ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini menjadi perkara nasional. Bahkan setelah tiga hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa Ahok bersalah sehingga layak dipenjara selama dua tahun pada 9 Mei 2017, perkara ini menjadi perhatian dunia. Di berbagai belahan Indonesia dan di luar negeri terjadi gerakan 1.000 lilin sebagai ekspresi kekecewaan atas keputusan pengadilan (<http://www.dw.com/id/aksi-1000-lilin-untuk-ahok-digelar-di-berbagai-kota/a-38809053>). Berbagai lembaga dan media internasional mengemukakan putusan ini seraya mengingatkan bahwa ini mencoreng citra Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas (“International rights groups express concerns following Ahok verdict,” <http://www.thejakartapost.com/news/2017/05/09/intl-rights-groups-express-concerns-following-ahok-verdict.html>).

Namun di lain sisi, beredar foto sekelompok orang penentang Ahok memotong tumpeng pasca keputusan ini. Seorang tokoh politik berpengaruh menyatakan

acara tersebut merupakan spontanitas orang yang merayakan syukur atas keadilan yang telah ditegakkan: penista agama telah diberikan hukuman yang setimpal (“Beredar foto syukuran atas vonis Ahok, Prabowo sebut itu spontanitas,” <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/10/23251471/beredar.foto.syukuran.atas.vonis.ahok.prabowo.sebut.itu.spontanitas>).

Sementara gerakan mendukung Ahok terus berlangsung; gerakan yang menentangnya dan membenarkan keputusan pengadilan terlihat tidak surut juga. Semakin kuatnya dukungan terhadap Ahok, apalagi saat dukungan ini berupa tekanan dunia internasional, justru membuat gerakan ini menampilkan diri semakin perlu. Demikianlah, Ahok menjadi figur yang memicu gerakan sosial yang masif dan saling bertentangan.

Bagaimana pun gerakan massa ini tak dapat dipisahkan dari konteks Pilkada DKI Jakarta (Hodge, A. (2017). Jakarta pollstrokes fears. *The Australian*, April, 21, 2017, hlm. 13. <http://www.theaustralian.com.au/news/inquirer/anies-beats-ahok-jakarta-election-stokes-fears-over-islamists/news-story/6f825a44bfb6e68e037655cfb567be505>).

Namun tidak menutup kemungkinan pola yang sama diulang dalam Pilkada yang lain dan pemilihan presiden

dan wakil presiden yang akan datang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pola gerakan sosial atau mobilisasi massa yang saling bertentangan pada peristiwa Ahok? Apa yang menyebabkan suatu gerakan sosial berhasil sementara yang lain gagal? Bagaimana cara membantu masyarakat agar kritis terhadap upaya penggerakan massa demi kepentingan sempit dan sesaat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini hendak membedah kasus Ahok dengan kerangka *framing* gerakan sosial yang ditawarkan oleh Snow & Benford (1988) dan Benford & Snow (2000). Ada dua gerakan yang muncul dari kasus Ahok. Gerakan pertama sangat teroganisir dan menyebut diri sebagai Gerakan Bela Islam (GBI) yang menuntut agar Ahok dipidana. Sementara gerakan kedua, bersifat cair dan tidak secara eksplisit menamakan diri. Untuk kepentingan tulisan ini, gerakan kedua saya sebut sebagai Gerakan Merawat Keragaman (GMK) dengan alasan gerakan ini tidak hanya sebatas membela Ahok melainkan lebih daripada itu menyerukan bahwa kasus Ahok merupakan tanda terancamnya keragaman Indonesia.

### Dari mimbar ke jalanan

Konsep *frame* dalam gerakan sosial mengambil inspirasi dari karya Goffman (1974). Menurut Goffman, *frame* adalah “kerangka penafsiran yang memungkinkan orang untuk menempatkan, memahami, mengidentifikasi dan menamai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sekitar mereka maupun dunia secara keseluruhan” (hlm. 21). *Frame* berperan membantu orang menyarikan peristiwa dan kejadian menjadi pengalaman bermakna, kemudian mengorganisasi pengalaman tersebut dan memberi panduan untuk bertindak.

Bertolak dari gagasan Goffman, Snow & Benford (1998) menawarkan konsep *framing* – proses penciptaan *frame* – untuk menjelaskan gerakan sosial atau aksi kolektif. Mereka berpendapat bahwa dalam gerakan sosial terjadi *framing*, atau lebih tepat gerakan sosial merupakan hasil suatu *framing* dan menghasilkan *frame* tertentu. Dalam gerakan sosial, *frame* diciptakan untuk memahami peristiwa dengan cara menyederhanakan dan menyarikan apa yang terjadi “dunia di luar sana” dan penyederhanaan ini “bertujuan untuk memobilisasi pengagum dan pengikut, menuai dukungan dari penonton, dan membuyarkan (*demobilized*) penentang” (Snow & Benford, 1988,

hlm. 198). Dengan kata lain, *frame* aksi kolektif adalah, *pertama*, seperangkat keyakinan dan pemaknaan, yang berorientasi pada aksi dan yang menginspirasi serta melegitimasi aksi tersebut; *kedua*, kampanye yang bertujuan untuk menggerakkan sekelompok orang (massa) (Benford & Snow, 2000).

*Frame* tindakan kolektif diciptakan sebagai bagian dari upaya untuk menegosiasikan pandangan dan sikap terhadap suatu persoalan yang menurut para inisiator gerakan ini perlu diubah. Termasuk di dalam negosiasi ini adalah (1) menentukan apa atau siapa yang mesti disalahkan, (2) kemudian menyampaikan alternatif tindakan yang mesti diambil dan akhirnya (3) mendorong orang banyak agar bergerak bersama mewujudkan perubahan. Benford & Snow (2000) menyebut tiga hal tersebut sebagai peran utama *framing*, yang mereka bedakan sebagai *diagnostic framing*, *prognostic framing*, dan *motivational framing*.

Terkait tugas utama *framing* ini, para inisiator gerakan berperan penting dalam “mobilisasi konsensus” dan “mobilisasi aksi” (Benford & Snow, 2000). Mobilisasi konsensus mendorong terjadinya kesepakatan tentang suatu persoalan, sementara mobilisasi aksi mendorong terjadinya gerakan. Jelaslah di sini bahwa aksi kolektif tidak lain merupakan gerakan dari mimbar ke jalanan, dari pikiran ke tangan dan kaki. Dari mimbar, sang inisiator gerakan berseru dan memberikan gagasan kepada massa agar mereka bergerak turun ke jalanan. Dalam konteks zaman sekarang, dunia maya dan media sosial adalah bagian dari mimbar sekaligus jalanan yang diperebutkan oleh berbagai *frame* yang saling bersaing.

### Tiga peran framing

*Diagnostic framing* berperan mengidentifikasi masalah dan penyebab masalah tersebut. Menunjukkan masalah secara jelas dan terang-benderang adalah langkah pertama (Benford & Snow, 2000). *Frame* yang berhasil biasanya menampilkan persoalan rumit dengan cara sederhana. Salah satu model *diagnostic framing* yang paling sering dipakai adalah “*frame* ketidakadilan.” Satu tahapan penting dalam *frame* ini adalah mengidentifikasi “korban” ketidakadilan dan menggemakan ketidakadilan ini. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan pelaku ketidakadilan tersebut.

Dalam kasus yang kita bahas, (GBI) memperlihatkan masalah bahwa Islam sedang diancam atau diserang. Pada awalnya dalam berbagai aksi, GBI menyerukan

bahwa Al-Quran dihina dan dinista oleh Ahok dalam pidatonya di Pulau Seribu. Dalam perjalanan, lewat berbagai ceramah dikatakan bahwa sedang terjadi upaya memecah-belah Islam dengan membenturkan kelompok Islam fundamentalis dan tradisional serta upaya “makarisasi, teorisasi, dan kriminalisasi” ulama Islam. Contoh paling jelas dari ceramah ini disampaikan oleh Rizieq Shihab saat berkunjung ke Madinah. Ceramah ini kemudian disebar lewat media sosial. Logika yang ditawarkan GBI: saat ini Islam sedang terancam sehingga mesti dibela. Tampak jelas juga bahwa Islam, Al-Quran dan para ulama ditampilkan sebagai korban ketidakadilan.

Berbeda dengan GBI, gerakan kedua tidak muncul secara jelas. Gerakan ini berawal dari kelompok orang yang berpendapat bahwa Ahok tidak bersalah ketika penegak hukum menetapkan Ahok sebagai tersangka. Gerakan tampak lebih jelas ketika banyak orang mengirimkan karangan bunga ke kantor gubernur DKI, mengikuti kekalahan Ahok-Jarot dalam Pilkada DKI, 19 April 2017. Pasca dijatuhkannya vonis kepada Ahok, 9 Mei 2017, gerakan penyalan seribu lilin tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan meluas ke berbagai provinsi dan merobos batasan Indonesia, terjadi di berbagai kota besar di berbagai belahan dunia. Pada titik ini gerakan ini dapat disebut sebagai Gerakan Merawat Keragaman (GMK), yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia menghadapi masalah besar dan serius: kebhinekaan terancam oleh pemanfaatan sentimen agama dan kesukuan demi tujuan politik dan sistem peradilan yang tidak menghasilkan keadilan. Dalam gerakan ini, Ahok ditampilkan sebagai tokoh yang mengalami ketidakadilan dan penanda masalah mendasar Bangsa Indonesia. Demikianlah, bertolak dari kasus yang sama, dua *frame* berbeda menyerukan masalah berbeda dan menampilkan dua korban berbeda.

Setelah masalah ditentukan, bagian berikutnya dari *diagnostic framing* adalah mengidentifikasi sumber masalah atau menunjuk siapa atau apa yang dipersalahkan atau harus bertanggung jawab (Benford & Show, 2000). Dalam GBI, Ahok dituding bersalah menghina Al-Quran sementara pemerintah, khususnya POLRI, disangka melakukan makarisasi, terorisasi, dan kriminalisasi terhadap figur-figur yang dipersepsikan sebagai ulama. Dalam GMK, penyebab dari masalah saat ini adalah politisasi agama serta pembiaran dan ketidaktegasan pemerintah, secara khusus POLRI, terhadap gerakan-gerakan yang dipandang intoleran dan

radikal.

Dalam aksi sosial, konsensus tentang inti masalah tidak dengan sendirinya diikuti konsensus mengenai sumber masalahnya. Kontroversi tentang siapa dan apa yang mesti dipersalahkan dapat terjadi tidak hanya di antara berbagai gerakan sosial yang berbeda namun juga dalam satu gerakan yang sama. Bahkan dalam satu gerakan yang sama, misalnya gerakan seribu karangan bunga dan seribu lilin untuk Ahok, para pelaku mempunyai cara berbeda dalam melihat inti masalah. Ada yang tergerak karena melihat Ahok telah diperlakukan tidak adil, namun tidak sedikit pula yang melihat kasus Ahok hanyalah penampakan kecil dari persoalan peradilan di Indonesia yang buruk. Sebagian yang lain melihat kasus ini sebagai puncak gunung es persoalan terancamnya kebhinekaan Indonesia.

Setelah masalah ditentukan, tugas berikutnya dari *framing* adalah peran prognosis (*framing prognostic*), yaitu menawarkan kemungkinan solusi atas masalah atau rencana untuk menghadapi masalah, serta strategi untuk melaksanakannya (Benford & Show, 2000). Dalam hal ini, kemungkinan mengenai solusi dan strategi yang mesti diperjuangkan tergantung pada hasil proses indentifikasi masalah dan sumber masalah. Ketidakjelasan dan tiadanya kesepakatan tentang masalah dan penyebabnya, dapat berujung pada ketidakjelasan akan apa yang mesti dilakukan dan strategi untuk memobilisir massa agar bergerak.

GBI sejak November 2016 sudah menawarkan alternatif solusi atas masalah dengan sangat jelas: penjarakan Ahok! Sebaliknya, GMK masih mencari bentuk dan konsensus untuk mengatasi masalah yang sudah dirumuskan. Meski benih-benihnya telah ada sejak kasus Ahok mencuat, GMK baru massif terjadi setelah Ahok divonis bersalah. Sifat gerakan yang spontan, tersebar dan tanpa pimpinan yang jelas, pada satu sisi memperlihatkan ketulusan gerakan ini, namun pada sisi lain menyulitkan konsesus solusi. Sebagian peserta aksi menuntut agar Ahok dibebaskan dengan alasan putusan hakim tidak adil. Sementara yang lain, mengajak menghormati proses peradilan sekaligus menuntut agar pasal 156a KHUP tentang penodaan agama dan pasal 156 tentang kebencian dan penghinaan ditinjau dan dihapuskan. Ada peserta yang sudah sepakat bahwa penyebab terancamnya kebhinekaan adalah intoleransi dan politisasi agama, namun tiada solusi yang jelas untuk mengatasinya, selain seruan abstrak semacam menjaga kedamaian dan dukungan

kepada penegak hukum agar tegas terhadap segala bentuk kekerasan dan intoleransi. Ketidakjelasan solusi yang ditawarkan ini membuat daya dobrak gerakan ini kurang kuat dibanding GBI, meski dari sisi massa tidak kalah banyak dibanding GBI, melibatkan kelompok masyarakat yang lebih luas baik dari kalangan non-Muslim maupun Muslim, dan penyebarannya jauh lebih luas.

Agar dapat menggerakkan orang, *framing* juga punya peran *motivasi* (*motivational framing*), yaitu menyediakan alasan untuk terlibat dalam gerakan bersama untuk memperbaiki situasi, termasuk di dalamnya menciptakan kosa kata dan jargon yang cocok untuk memotivasi (Benford & Show, 2000). Dalam hal

ini kita dapat melihat betapa GBI didukung oleh para motivator ulung yang mampu membakar semangat pendukungnya. Razieq Shihab, misalnya, dengan lantang menyerukan “penista agama,” “pemimpin kafir,” “revolusi” dan memekikkan takbir dalam orasi-orasinya. Kata-kata ini berdaya motivasi sangat kuat. GMK tidak memiliki tokoh yang menonjol namun juga menyerukan kata-kata kuat seperti “NKRI harga mati,” “Jaga Pancasila,” “perdaamaian,” “keragamaman” dan “keadilan.” Masalahnya, kata-kata ini dengan segera diklaim juga oleh GBI dengan menyatakan bahwa gerakannya “damai” dan “konstitusional,” “Cinta NKRI,” “menjunjung Pancasila” dan “supremasi hukum demi keadilan.”

**Tabel 1. Peran *Framing* dalam GBI dan GMK**

Tahapan <i>Framing</i>	Gerakan Bela Islam (GBI)	Gerakan Merawat Keragaman (GMK)
Diagnosis Masalah	● Islam diancam dan dilecehkan	● Nilai kebhinnekaan terancam ● Putusan hakim yang tidak adil atas kasus Ahok
Sumber Masalah	● Ahok ● Pemerintah (kriminalisasi ulama)	● Kelompok intoleran ● Pemerintah (pembiaran kelompok intoleran)
Prognosis	○ Hukum Ahok ○ Pemerintah jangan memusuhi umat Islam	○ Bebaskan Ahok ○ Hakim mesti beri putusan yang adil ○ Cabut pasal penodaan agama ○ Jaga kebhinnekaan ○ Pemerintah mesti tegas terhadap kelompok intoleran
Motivasi	● Perintah agama	● Awalnya solidaritas terhadap Ahok
Motivator	● Jelas dan konsisten: tokoh Islam fundamentalis dan partai oposisi	● Tidak ada tokoh yang menonjol

#### **Faktor penentu efektivitas suatu frame**

Pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah mengapa beberapa frame berhasil (efektif) menggerakkan massa sementara yang lain tidak? Benford and Snow (2000) mengistilahkan frame yang efektif ini sebagai frame yang menggema (*resonate*). Mereka menyebut dua faktor saling terkait yang menjelaskan tingkat gema (*resonance*) dari frame: kredibilitas frame yang ditawarkan dan kejelasannya.

Kredibilitas frame ditentukan oleh tiga faktor: konsistensi frame, kredibilitas empiris dan kredibilitas insiator frame. *Konsistensi frame* mengacu pada keselarasan antara keyakinan, klaim dan tindakan. Konsistensi frame dapat terganggu oleh dua hal: kontradiksi di antara berbagai keyakinan dan klaim yang ditawarkan, atau kontradiksi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Semakin besar dan semakin jelas kontradiksi dalam suatu frame, semakin

berkuranglah gemanya dan semakin bermasalah dalam penerapannya untuk mobilisasi.

*Kredibilitas empiris dari frame* mengacu pada kecocokan antara framing dengan kejadian nyata. Yang menjadi soal utama di sini bukan mengenai apakah diagnosis dan prognosis yang ditawarkan sungguh didasarkan pada fakta atau informasi yang valid, melainkan apakah acuan empirisnya terbuka untuk dibaca sebagai indikasi dari diagnosis yang sesungguhnya. Dengan kata lain, apakah klaim dapat diverifikasi secara empiris?; apakah ada sesuatu di luar sana yang dapat ditunjuk sebagai bukti dari klaim yang ditawarkan? Semakin dipercaya suatu bukti dan semakin banyak jumlah potongan bukti serupa, semakin kredibel suatu frame dan semakin mampu menarik pengikut. Karena itulah, untuk mendukung klaim, setiap frame selalu memperlihatkan bukti yang ditemukan, dan kalau perlu mereka-reka atau menciptakan bukti (*hoax*). Pada sisi lain, mereka yang sudah meyakini suatu frame akan selalu mampu menghubungkan fakta yang tidak terkait dan memberikan makna sesuai dengan frame tersebut.

Faktor penting terakhir bagi kredibilitas frame gerakan sosial adalah kredibilitas dari artikulator frame, yaitu orang atau kelompok yang menyerukan atau menawarkan frame. Semakin tinggi status atau semakin mumpuni artikulator frame, semakin diterima dan semakin bergema frame tersebut.

Selain soal kredibilitas, gema (*resonance*) suatu frame untuk aksi kolektif dipengaruhi oleh kejelasannya (*salience*) bagi kelompok sasaran mobilisasi (Benford & Snow, 2000). Ada tiga dimensi kejelasan: sentralitas (*centrality*), kedekatan pengalaman (*experiential commensurability*), dan keselarasan naratif (*narrative fidelity*). *Sentralitas* menyangkut seberapa penting kepercayaan, nilai atau ide yang dihubungkan dengan frame gerakan bagi kehidupan kelompok sasaran mobilisasi. *Kedekatan* dengan pengalaman berurusan dengan pertanyaan apakah frame selaras atau terkait dengan pengalaman pribadi sehari-hari dari kelompok sasaran mobilisasi, atau mereka terlalu abstrak dan jauh dari kehidupan dan pengalaman kelompok sasaran? Semakin dekat suatu frame dengan pengalaman pribadi massa yang ditarget, semakin jelas mereka dan semakin besar potensi keberhasilannya dalam memobilisasi.

Faktor terakhir yang berpengaruh besar terhadap gema frame adalah keselarasan naratif, yaitu seberapa dalam frame yang ditawarkan berakar pada narasi budaya massa yang ditarget, seberapa cocok mereka

dengan “mitos”, keyakinan dominan, dan ideologi yang dipeluk oleh massa yang ditarget. Jika keterkaitan macam itu ada, maka frame tersebut memiliki keselarasan naratif. Semakin besar keselarasan naratif suatu frame yang ditawarkan, semakin jelas dia bagi massa yang disasar dan semakin besar potensi mereka untuk memobilisasi massa.

### **Menakar efektivitas dua *frame* yang bersaing**

Apa yang dapat dikatakan jika GBI dan GMK dievaluasi dengan kerangka yang ditawarkan Benford and Snow (2000) tersebut? Sebelum menjawab pertanyaan ini perlu dikatakan bahwa penilaian kredibilitas dan kejelasan suatu frame adalah subjektif dan sangat tergantung berada pada posisi mana si penilai: apakah dia sebagai pengagum-pengikut, penonton, atau penentang. Bagi para pengagum dan pengikut, seperti apa pun keadaannya, suatu frame akan diterima sebagai frame yang kredibel dan jelas. Demikian pula halnya dengan artikulatornya. Sebaliknya, bagi kelompok penentang, walau pun dapat melihat kejelasan suatu frame, mereka akan mengatakan bahwa frame tersebut tidak kredibel. Karena itu, analisa efektivitas suatu frame sebaiknya menggunakan perspektif penonton atau pihak netral yang belum mengambil posisi. Suatu frame dikatakan efektif apabila mampu membuat orang yang awalnya hanya menonton memutuskan untuk setuju dan ikut bergerak seperti yang diarahkan oleh frame.

GBI sangat kuat pada aspek kejelasan, namun sebenarnya agak lemah dari sisi kredibilitas. Sebaliknya, GMK kuat pada sisi kredibilitas, namun lemah dalam aspek kejelasan (Lihat Tabel 2). Terkait dengan aspek kejelasan, GBI dengan cerdas mengambil isu yang sangat setral bagi mayoritas masyarakat Indonesia: agama (dalam hal ini Islam). Banyak survei memperlihatkan betapa sangat penting agama bagi masyarakat Indonesia (“Tata nilai, impian, dan cita-cita pemuda muslim di Asia Tenggara. Survei di Indonesia dan Malaysia,” [https://www.goethe.de/ins/id/pro/jugendstudie/jugendstudie\\_id.pdf](https://www.goethe.de/ins/id/pro/jugendstudie/jugendstudie_id.pdf)). Dengan demikian, frame yang ditawarkan oleh GBI memenuhi persyaratan sentralitas isu. Terkait dengan kedekatan, persoalan yang diangkat pun sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, mengingat agama adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dibicarakan, dan dipraktikkan setiap hari, serta mempunyai ajaran dan ritual yang jelas. Apakah GBI setia pada narasi besar Islam, sebenarnya dapat



Tabel 2. Kredibilitas dan Kejelasan GBI dan GMK

	Gerakan Bela Isla (GBI)	Gerakan Merawat Keragaman (GMK)
<b>Kredibilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kurang: Islam Agama Damai vs indikasi kekerasan yang ditampilkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Konsisten: pluralitas, perdamaian</li> </ul>
<b>Konsistensi</b>		
<b>Kredibilitas empiris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kurang: Sebagian cendekiawan Muslim berpendapat bahwa Ahok telah menista Al-Quran.</li> <li>● Kurang: bukti makarisasi, kriminalisasi, dan terorisasi tidak kuat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuat: bukti-bukti kekerasan kelompok GBI</li> </ul>
<b>Kredibilitas inisiator</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kurang: Inisiator adalah kelompok oposisi terhadap pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kurang punya tokoh, orator, motivator kurang</li> </ul>
<b>Kejelasan</b>		
<b>Sentralitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kuat: Agama (Islam) sangat penting masyarakat Indonesia</li> <li>● Agama sangat dekat dengan praktik hidup sehari-hari</li> <li>● Selaras dengan narasi besar agama; namun kontradiktif dengan pesan Islam yang damai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kurang: nilai pluralitas lebih merupakan urusan kelompok minoritas</li> <li>● Kurang dekat: ritual merayakan nilai keberagaman dan kebangsaan sangat kurang dibanding dengan ritual keagamaan</li> <li>● Selaras dengan narasi cita-cita kemerdekaan Indonesia dan nilai Bhineka Tunggal Ika.</li> </ul>
<b>Kedekatan dengan pengalaman</b>		
<b>Kesetiaan naratif</b>		

diperdebatkan. Jawaban tergantung pada wajah Islam macam apa yang hendak ditampilkan. Namun, karena dalam agama selalu banyak narasi yang dapat diambil dan GBI menawarkan keharusan dan perjuangan membela Islam, maka dapat dikatakan bahwa narasi GBI tidak bertentangan dengan narasi Islam, sebagaimana juga setiap agama mengajarkan perlunya menjunjung dan membela ajaran agama. Maka, dapat dikatakan bahwa frame yang ditawarkan GBI setia dengan narasi utama.

Sebaliknya, isu terancamnya keragaman yang diangkat KBK pada awal tampaknya tidak begitu sentral dan dekat dengan kehidupan orang banyak; persoalan ini dapat dicerna hanya oleh kelompok terdidik dan berpandangan terbuka. Kalaupun ada gambaran tentang bahaya, sifatnya lebih abstrak dan gambaran tentang musuh pun kurang jelas. Dari sisi keselarasan narasi, narasi keutuhan NKRI sebenarnya kuat, namun dibandingkan dengan narasi keagamaan, "ritual" untuk merawat nilai kebangsaan ini sangat minim, apalagi kalau dibandingkan dengan ritual keagamaan yang dilaksanakan setiap hari atau minimal seminggu sekali.

Dari sisi kredibilitas, orang awam dapat mempertanyakan banyak pertanyaan terhadap GBI. Dari sisi konsistensi keyakinan, klaim, dan tindakan, sebagian orang menilai apa yang ditampilkan GBI (misalnya orasi berapi-api penuh kata-kata tajam, keras dan provokatif) kurang selaras dengan keyakinan Islam sebagai agama yang damai. Dalam hal ini kita bersama menyaksikan dan mendengar betapa kerasnya suara dan seruan di media sosial. Sementara itu bukti bahwa Ahok telah menista Al-Quran bagi sebagian orang sebenarnya dinilai tidak kuat. Beberapa cendekiawan Muslim yang kredibel menyatakan bahwa apa yang disampaikan Ahok adalah kritik terhadap politisasi ayat Al-Quran yang dilakukan secara massif oleh beberapa politisi ("Buya Saffii: Ahok tidak menghina Alquran," <http://www.beritasatu.com/megapolitan/397606-buya-syaffi-ahok-tidak-menghina-alquran.html>). Lebih tidak kuat lagi adalah bukti atas sangkaan bahwa polisi telah melakukan makarisasi, kriminalisasi dan terorisasi ulama dan umat Islam. Bagi sebagian besar orang, para inisiator gerakan ini pun bagi orang kebanyakan kurang kredibel. Banyak di antara mereka adalah kelompok Islam fundamentalis

dan kelompok oposisi dari pemerintah. Oleh karena itu, tujuan murni dari gerakan ini sebenarnya dapat dipertanyakan.

Sementara itu, kelompok GMK menyuarakan pandangan mereka dengan cara yang tampak konsisten dengan apa yang mereka perjuangkan: merangkul berbagai pihak dan mengungkapkan pandangan dengan cara yang damai (mengirimkan karangan bunga, menyalakan lilin, bernyanyi, orasi secara santun). Gerakan ini sebenarnya memiliki kredibilitas empiris karena banyaknya bukti kekerasan oleh kelompok intoleran yang mengancam pihak yang tidak sependapat dengan pandangan mereka. Misalnya, dalam beberapa kali aksinya, GBI melakukan tindak kekerasan terhadap jurnalis dari media stasiun televisi yang mereka anggap menyampaikan berita mendiskreditkan. Contoh lain adalah intimidasi terhadap seorang dokter di Padang Muslim yang mendukung GMK lewat media sosial. Terkait dengan inisiator, GMK ini tidak punya tokoh sentral, kurang orator dan motivator yang kuat. Di satu sisi hal ini menandakan bahwa pelaku gerakan ini tidak punya kepentingan pribadi, namun ini juga merupakan kelemahan. Sifat gerakan ini yang cair, sporadis, serta kurang jelas arah dan saran yang ditawarkan (*prognosis*) membuat gerakan ini tampak kurang berhasil.

Pertanyaan berikutnya, dari antara dua framing yang bersaing, GBI dan GMK, mana yang unggul? Pertanyaan ini sebenarnya tidak mudah dijawab. Jawaban yang 'objektif' hanya dapat diperoleh dengan mensurvei para 'penonton'. Di sisi lain, jawaban atas pertanyaan ini juga sangat tergantung kapan pertanyaan itu diajukan. Namun, kalau tujuan paling konkret dari dua aksi sosial itu, dijadikan ukuran (tujuan dari GBI: vonis bersalah terhadap Ahok; sementara tujuan GMK adalah pembebasan Ahok dan penghapusan pasal pendodaan agama), maka jelaslah bahwa BGI tampaknya lebih berhasil dibanding GMK. GBI bahkan memiliki alumni (alumni Gerakan 212) yang pada awal November 2017 melakukan peringatan satu tahun gerakan 411. Sebaliknya, pasca keputusan Ahok untuk tidak mengajukan banding atas vonisnya, tampaknya tampak tidak ada lagi GMK yang langsung terkait dengan kasus Ahok.

Namun di lihat dari sisi lain, tidak dapat juga mengatakan GMK gagal, khususnya ketika peningkatan perhatian masyarakat terhadap perlunya merawat keberagaman dijadikan tolok ukur penilaian. Setelah

adanya GMK, semakin banyak orang sadar dan bersuara tentang pentingnya menjaga keragaman dan kebhinekaan Indonesia. Setelah GMK, Presiden Jokowi membentuk Tim Pengarah Pembina Ideologi Pancasila (7 Juni 2017), yang salah satu tugasnya adalah merawat nilai keragaman. Setelah gerakan ini, POLRI lebih berani lebih tegas terhadap kelompok radikal dan ormas yang menggunakan kekerasan. Dalam berbagi kesempatan, Kapolri Tito Karnavian menyatakan komitmen POLRI untuk tegas terhadap kelompok intoleran dan meminta agar masyarakat, *the silent majority*, tidak tinggal diam terhadap intoleransi. Dia katakan bahwa suara dari masyarakat sangat penting karena menjadi dukungan dan legitimasi sosial bagi POLRI untuk bertindak tegas. Berikutnya, pada tanggal 10 Juli 2017 Pemerintah mengeluarkan Perpu No.2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas. Atas dasar Perpu tersebut pemerintah dapat bertindak lebih cepat untuk membubarkan ormas yang menentang ideologi Pancasila atau meresahkan masyarakat, misalnya dengan melakukan persekusi dan mengancam kelompok lain. Pada 24 Oktober 2017, setelah melewati perdebatan alot, DPR mengesahkan Perpu ini menjadi UU.

Demikianlah, banyak perubahan terjadi setelah GBI dan GMK. Namun menyatakan bahwa GMK menyebabkan perubahan tersebut kiranya terlalu tegesa karena kemungkinan penyebab lain belum kita periksa. Tetapi bolehlah menduga bahwa GMK berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan sikap pemerintah tersebut, dan perubahan ini dapat menjadi indikasi dampak dari GMK. Meski demikian, dua frame GBI dan GMK masih potensial saling bersaing. Tidak menutup kemungkinan bahwa dua frame ini dipakai lagi pada masa yang akan datang untuk kasus dan kepentingan berbeda.

### **Mengambil sikap**

Dalam kehidupan bermasyarakat, akan selalu ada kontestasi atau persaingan frame. Suatu frame, berikut segala kepentingannya – politik, ekonomi, sosial, dll. – bersaing dengan frame yang lain untuk merebut pengaruh masyarakat. Dalam konteks persaingan politik yang nyata, seruan untuk merebut pengaruh dengan cara-cara beradab penting. Namun sekadar seruan tidak cukup karena semua pihak akan mengklaim diri beradab. Seruan untuk kembali pada Frame Besar menjaga keutuhan NKRI, nilai-nilai Pancasila dan keragaman

suku, budaya dan agama pun tidak memadai karena semua frame yang bersaing, jika kondisi menuntut, pasti akan berusaha memperlihatkan keselarasan naratif dengan Frame Besar dan mengklaim mendukung Pancasila, NKRI, UUD 1945, menjunjung keragaman, mendasarkan diri pada hukum, dan memperjuangkan keadilan.

Di lain sisi, setiap orang mau tidak mau, sadar atau pun tidak, menggunakan frame untuk memaknai peristiwa dalam masyarakat dan mengambil sikap terhadapnya serta bertindak. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis atas berbagai frame yang ditawarkan dan kejernihan pikiran dan hati serta kesadaran untuk memilih frame yang adil dan tidak merugikan pihak lain. Setiap orang mesti dapat mempertanggungjawabkan di hadapan hatinuraninya pilihannya atas suatu frame.

Selanjutnya, perlu mengupayakan agar frame yang kita yakini dapat diterima, diyakini dan menggerakkan banyak orang. Agar ini terjadi, kita perlu menyusun strategi dengan baik. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mendeligitimasi frame pesaing. Analisislah masalah apa yang diangkat oleh frame pesaing, siapa yang disalahkan, aksi apa yang diserukan, dan bagaimana cara-cara memotivasi massa. Perhatikan bahwa frame tersebut tidak kredibel dengan menunjukkan inkonsistensinya, ketidaksambungannya dengan kenyataan dan ketidakdibelan artikulatornya, khususnya dengan menyingkap motif politik dan ekonomi dibalik gerakan yang menawarkan suatu frame, dengan mencermati siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh gerakan ini dari sisi politik dan ekonomi.

Pada sisi lain, perlu juga menganalisa frame yang kita tawarkan sehingga jelas bagi kita sendiri mengenai

masalah apa yang kita perjuangkan dan siapa yang menjadi sumber masalah ini. Perlu juga diungkapkan dengan lebih jelas bukti-bukti bahwa yang kita angkat sebagai masalah memang merupakan masalah orang banyak. Perlu dipikirkan juga kelompok mana yang ingin kita ajak bergerak dan bagaimana mendekatkan masalah yang kita perjuangkan dengan kepentingan dan perhatian mereka, pengalaman sehari-hari serta keyakinan mereka. Kita juga perlu menciptakan kosakata motivasi yang tidak mudah diambil alih oleh frame pesaing, tetapi sebaliknya dapat mendeligitimasi frame pesaing. Hanya dengan cara itu, kita dapat mengajak para penonton ikut bergerak dan memperjuangkan apa yang kita perjuangkan. ●

**A. Sumarwan, SJ**

Dosen Universitas Sanata Dharma

#### **RUJUKAN**

- Benford, R.D. & Snow, D.A., "Framing process and social movements: an overview and assessment", *Annual Review of Sociology*, 26, 2000: 611-39.
- Goffman, E., *Frame Analysis: An Essay on the Organization of the Experience*, New York: Harper Colophon, 1974.
- Snow, D.A. & Benford, R. D., "Ideology, frame resonance, and participant mobilization". *Int.Soc.Mov.Res*, 1, 1988: 197-218.
- Yang, C. & Modell, S., "Shareholder orientation and the framing of management control practices: A field study in a Chinese state-owned enterprise", *Accounting Organizations and Society*, 45 (2015), 1-23.